

STRATEGI BERTAHAN SMA SWASTA PILIHAN KEDUA MENGHADAPI KOMPETISI DALAM PENDIDIKAN

THE STRATEGY OF SECOND CHOICE PRIVATE SCHOOLS TO FACE EDUCATION COMPETITIVENESS

Nanang Martono, Elis Puspitasari, FX Wardiyono
Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

E-mail: nanang.martono@unsoed.ac.id; elis.puspitasari@unsoed.ac.id;
fx.wardiyono@unsoed.ac.id

Naskah diterima tanggal: 03-03-2020, disetujui tanggal: 01-06-2020

Abstract: *Competition in education requires the private schools to compete with public schools since they have been as the second choice. As the second choice, most private schools have been in failure to recruit talented and intelligent intake students. This article describes the efforts of private schools as the second choice, to face the competition with other public schools for its survival. This study used grounded theory method by taking 10 private high schools and located in Banyumas district. This district is chosen because the number of private schools is increased almost significantly. Data was collected using observation, interview, and documentation. The result of the study showed that strategies used by this type of school include among others, strategically promote themselves to a potential junior high school, choose a low economic and low academic students as their main targets, and offering low-cost education, if possible, offering free cost education for low economic students.*

Keywords: *competition, liberalization, private school, school choice*

Abstrak: *Kompetisi dalam pendidikan menuntut sekolah swasta harus mampu bersaing dengan sekolah negeri karena mereka menjadi pilihan kedua. Sebagai pilihan kedua maka kebanyakan sekolah swasta tidak mampu menarik siswa-siswa unggulan dan berprestasi. Tujuan studi ini adalah mendeskripsikan usaha yang ditempuh SMA swasta sebagai pilihan kedua untuk berkompetisi dengan sekolah negeri agar dapat bertahan. Penelitian menggunakan metode kualitatif grounded theory di 10 SMA swasta pilihan kedua di Kabupaten Banyumas. Kabupaten ini dipilih karena peningkatan jumlah sekolah swasta yang cukup tinggi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil studi menunjukkan strategi yang dilakukan sekolah swasta pilihan kedua di antaranya, adalah melakukan promosi secara strategis ke SMP yang menjadi target potensial, memilih siswa tidak mampu, dan memiliki kemampuan akademik rendah sebagai sasaran utama, dan menawarkan biaya sekolah murah bahkan menawarkan sekolah gratis bagi siswa tidak mampu.*

Kata kunci: *kompetisi, liberalisasi, sekolah swasta, pilihan sekolah*

PENDAHULUAN

Kompetisi antarsekolah semakin menguat ketika liberalisasi pendidikan mewarnai praktik pendidikan di Tanah Air. Kompetisi ini sebenarnya telah berkembang sebelum kompetisi yang

semakin menguat di ranah pendidikan. Wujud kompetisi ini terlihat dari perbedaan status sekolah secara horizontal yang membawa opini publik mengenai kualitas sekolah tertentu. Sebut saja status sekolah favorit dan tidak favorit

selalu menjadi bahan pertimbangan masyarakat ketika memilih sekolah.

Dampak perbedaan status tersebut semakin meluas. Sekolah favorit atau "sekolah pilihan pertama" mendapatkan "keistimewaan" karena dapat menyeleksi siswa sesuai kriteria yang diinginkan (Martono, 2018). Mereka juga dapat menentukan biaya sekolah yang relatif lebih mahal, sehingga hanya siswa kelas atas yang berkesempatan masuk ke sekolah tersebut. Sebaliknya, sebagian sekolah tidak favorit (atau dalam penelitian ini disebut "sekolah pilihan II") hanya menampung siswa yang gagal masuk ke sekolah pilihan I. Hasilnya, kualitas *input* mereka pun rendah. Sebagian besar siswa sekolah swasta berasal dari kelas menengah ke bawah (Davis, 2013).

Selain sekolah pilihan II, sekolah-sekolah yang berada di pinggiran kota dan pelosok desa juga terancam kekurangan siswa karena sedikit siswa yang berminat bersekolah di sana. Siswa yang memiliki modal ekonomi besar cenderung memilih bersekolah di kota. Sekolah di kota memiliki gengsi sosial lebih tinggi. Mekanisme ini memicu kompetisi antarsekolah yang semakin menguat (Benson, Bridge, & Wilson, 2015; Buddin, 2012; Davis, 2013).

Data yang dihimpun dari beberapa media massa, seperti: Bali Tribune (Habit, 2016), Tribun Bali (Santhosa, 2015), Jawa Pos (Safutra, 2017), Antara (2015) menunjukkan bahwa ada sebagian sekolah swasta yang harus tutup karena kekurangan siswa, kekurangan sumber daya manusia, serta keterbatasan fasilitas belajar. Kekurangan ini merupakan dampak mereka tidak memiliki sumber pembiayaan yang kuat. Aurini & Quirke (2011) menyebutkan bahwa sekolah swasta harus memiliki strategi dalam meningkatkan kualitasnya untuk bersaing dengan sekolah lain. Dengan demikian, upaya yang dilakukan sekolah swasta pilihan II untuk mempertahankan eksistensinya menjadi masalah yang penting diteliti.

Studi ini mengambil lokasi di Sekolah

Menengah Atas (SMA) swasta di Kabupaten Banyumas. Banyumas menjadi lokasi penelitian disebabkan peningkatan jumlah sekolah swasta di kabupaten ini cukup tinggi. Dalam 10 tahun terakhir, sejak 2007, ada penambahan 31 sekolah swasta pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK). Sementara sekolah negeri, terutama SMK negeri terus menambah daya tampungnya. Ini menyebabkan sekolah swasta pilihan II terancam mengalami kekurangan siswa baru setiap tahun.

Beberapa studi yang pernah dilakukan mengenai strategi sekolah menghadapi kompetisi antarsekolah lebih menekankan pada aspek promosi sekolah. Studi yang dilakukan Khasanah (2015) misalnya, menyoroti strategi pemasaran Sekolah Alam Baturraden untuk meningkatkan jumlah peminat. Studi tersebut menitikberatkan sekolah sebagai lembaga bisnis yang "menjual jasa".

Studi yang dilakukan Arumsari (2017) juga menganalisis strategi *branding* sekolah negeri di Semarang menghadapi kompetisi dengan sekolah-sekolah SD Islam terpadu. Penguatan *branding* yang ditawarkan dalam studi tersebut di antaranya peningkatan kualitas, kegiatan promosi, peningkatan jumlah fasilitas, serta penawaran program tambahan seperti kegiatan ekstrakurikuler.

Jubelina & Supramono (2013) menegaskan bahwa kondisi persaingan tersebut dapat menjadikan lembaga pendidikan yang mampu bertahan menjadi unggul, namun bagi lembaga pendidikan yang tidak mampu bertahan akan mengalami penurunan.

Kondisi yang dialami sekolah swasta pilihan II tidaklah mudah untuk meningkatkan *branding* atau sekedar melakukan upaya promosi atau pemasaran. Sekolah swasta pilihan II menghadapi masalah utama yaitu keterbatasan modal, sementara mereka, misalnya, tidak mungkin "menarik modal" dari siswa dengan menaikkan biaya pendidikan. Hal ini disebabkan

siswa yang bersekolah, sebagian besar berasal dari ekonomi bawah. Kondisi inilah yang membedakan studi ini dengan studi yang telah dijelaskan sebelumnya.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 sampai pertengahan 2018 dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode *grounded theory*, hal ini dikarenakan belum ada studi terdahulu mengenai masalah yang diteliti (bersifat eksploratif). Dalam penelitian ini, tidak dibatasi pada konsep, teori, pengalaman, atau hasil penelitian sebelumnya. *Grounded theory* menekankan penemuan teori yang dirumuskan berdasarkan data yang ditemukan dalam penelitian Martono (2017). Kajian ini difokuskan pada masalah yang dihadapi dan strategi bertahan yang dilakukan oleh SMA swasta pilihan II di Kabupaten Banyumas, serta alasan sekolah swasta harus merumuskan strategi bertahan sekolah di tengah kondisi yang serba terbatas. Sekolah swasta pilihan II adalah sekolah yang paling terdampak akibat adanya kompetisi ini.

Konsep “sekolah pilihan II” sebenarnya diambil dari dikotomi yang berkembang di masyarakat umum mengenai status “sekolah favorit” dan “sekolah tidak favorit”. Dikotomi ini memang sangat subjektif dan relatif, sehingga sulit bagi masyarakat awam, apa kriteria yang membedakan status kedua sekolah tersebut.

Secara sosiologis, SMA pilihan II didefinisikan sebagai sekolah yang tidak diminati siswa dan memiliki siswa sangat sedikit, sehingga jumlah rombongan belajar (rombel) juga sedikit. Untuk itu, secara objektif, SMA swasta pilihan II dalam studi ini dibatasi pada sekolah tipe C2, yaitu sekolah yang memiliki total 3-5 rombel.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif, penelitian dilakukan pada 10 sekolah swasta dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan guru dan atau kepala sekolah atau wakil

kepala sekolah yang menjadi lokasi penelitian, serta siswa dan orang tuanya. Observasi di sekolah-sekolah swasta tersebut meliputi lingkungan sekolah, prasarana dan sarana sekolah, dan proses pembelajaran. Dokumentasi dimaksudkan untuk menghimpun data sekunder yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti jumlah siswa, rombel, prasarana dan sarana sekolah. Analisis data dalam studi ini menggunakan metode analisis komparatif konstan (*constant comparative*). Model analisis ini merupakan teknik yang digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian saat dilakukan analisis pada kejadian tersebut. Model ini digunakan dalam penelitian *grounded theory*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah utama yang dihadapi SMA swasta pilihan II adalah jumlah calon siswa yang mendaftar hampir selalu lebih rendah daripada daya tampungnya. Hal ini disebabkan siswa cenderung memilih sekolah negeri sebagai prioritas utama. Sedikitnya jumlah calon siswa yang mendaftar di SMA pilihan II, melahirkan masalah yang lainnya. Masalah utama tersebut berujung pada sedikitnya pendapatan sekolah karena sedikitnya siswa. Bagi sekolah hal ini menjadi dilematis. Apabila sekolah-sekolah ini menaikkan biaya sekolah, mereka justru semakin sulit mendapatkan siswa. Masalah berikutnya, kualitas *input* siswa yang rendah. Pada umumnya siswa yang diterima adalah para siswa yang tidak diterima di sekolah negeri atau sekolah pilihan pertama.

Permasalahan yang dihadapi SMA swasta pilihan II tersebut menuntut sekolah untuk mencari strategi. Strategi yang ditempuh oleh sekolah berkaitan dengan masalah bagaimana mendapatkan siswa dan meningkatkan kualitas siswa dalam rangka untuk dapat bertahan.

Paling tidak ada empat strategi yang ditempuh dalam menghadapi persoalan rendahnya minat calon siswa mendaftar di sekolah pilihan II. Pertama, sekolah melakukan

strategi jemput bola. Strategi ini dilakukan dengan memberi tugas kepada guru untuk mencari calon siswa yang akan menempuh ujian akhir SMP. Strategi ini dilakukan dalam dua model, yakni "jemput bola" ke SMP tertentu dan *door to door* ke rumah calon siswa. Hal ini sebagaimana dituturkan HSM mengenai strategi yang dilakukan sekolahnya:

".... kami sedikit banyak punya basis, sedikit banyak basis nahdiyin. Kami jemput bola karena kalo tidak jemput bola ya habis. Kami bagi tugas, sebelum ujian SMP kami sudah punya data peserta ujian SMP, nanti guru-guru kami tugas untuk jemput bola, mendata siswa yang mau masuk di SMA sini..." (HSM – kepala sekolah)

Sekolah lain juga mendatangi rumah calon siswa yang tidak diterima di sekolah pilihan I. Strategi ini diungkapkan salah seorang guru:

"...mereka-mereka yang tadinya ingin ke negeri tapi kemudian di sekolah negeri tidak diterima dan akhirnya kita beri motivasi terus, kita datangi ke rumah dengan cara *door to door*..." (WN - guru)

Kedua, sekolah memanfaatkan jaringan sosial dengan SMP tertentu dan organisasi keagamaan atau yayasan. Sekolah mengharapkan siswa di SMP tersebut memiliki motivasi untuk melanjutkan ke SMA tersebut karena berada dalam satu yayasan. Sekolah bekerja sama dengan basis organisasi atau yayasan yang dimiliki sekolah. Strategi kedua diambil terkait dengan strategi pertama, menjemput bola ke sekolah sasaran yang bernaung dalam organisasi atau yayasan yang sama. Sekolah-sekolah swasta pada umumnya memiliki basis dalam organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Berikut ini penuturan AHM:

"... Kelebihan kita cuma satu, kita bekerja sama dengan pondok. Saya kira kalau kita punya asrama dan biayanya tidak terlalu mahal, saya kira memang banyak dari luar ya terutama orang yang tidak mampu. Kita sasarannya memang orang yang tidak

mampu sih yah, terus bisa ditampung di sini" (AHM – kepala sekolah)

Data yang diakses dari Kementerian Agama (dalam Yulianto, 2017) pada tahun 2016 di Indonesia ada 28.194 pondok pesantren dengan sekitar lima juta santri mukim. Pesantren-pesantren tersebut sebagian besar bernaung di bawah organisasi NU dan selebihnya berafiliasi ke Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam), Hidayatullah, dan Salafi. Di antara pesantren-pesantren tersebut terdapat santri yang juga mengikuti kegiatan belajar di luar pondok (sekolah). Pondok pesantren semacam inilah yang kemudian menjadi andalan bagi sekolah untuk dapat menitipkan siswanya.

Jejaring sosial yang dibangun sekolah dalam hal ini bekerja sama dengan organisasi NU. Bahkan, kerja sama ini dilakukan juga sebagai jalan keluar dari masalah rendahnya pendapatan sekolah. Muttaqin (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sejauh ini NU terus berusaha agar dapat meningkatkan kinerjanya untuk berpartisipasi dalam upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas tinggi.

NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia diakui memiliki komitmen dalam masalah pendidikan. Suprayogo (2015) mengemukakan bahwa NU dalam mengembangkan pendidikan lebih banyak berpihak pada kalangan masyarakat bawah, seperti petani desa, pedagang, buruh, nelayan, dan orang-orang yang berekonomi menengah ke bawah. Lembaga pendidikan NU, baik yang berbentuk pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah, pada umumnya mereka yang menampung.

Ketiga, sekolah melakukan promosi ke sekolah yang menjadi target potensial di sekitarnya bahkan sampai ke sekolah yang jaraknya relatif jauh ke luar kota. Sekolah melakukan promosi dengan membagikan *leaflet* dan brosur menjelang akhir tahun pendidikan.

Leaflet dan brosur biasanya berisi informasi tentang sekolah dan keunggulan yang dimiliki. Menurut Kusumo (2018) brosur dianggap sebagai media promosi yang efektif dan komunikatif untuk meningkatkan cakupan wilayah promosi dan meningkatkan jumlah peserta didik.

Guru yang mendapat tugas akan membawa *leaflet* dan brosur ke sekolah sasaran. Sekolah sasaran yang potensial di sekitar SMA swasta pilihan II adalah SMP yang statusnya sama sebagai sekolah swasta pilihan II dan sekolah swasta dengan basis organisasi keagamaan yang sama. Promosi dilakukan tidak hanya pada SMP di lingkungan sekolah tetapi sampai ke luar wilayah Banyumas yakni Kebumen, Brebes, dan Wonosobo.

Keempat, sekolah menawarkan biaya sekolah murah, bahkan menawarkan sekolah gratis bagi siswa tidak mampu. Sayangnya, upaya ini tetap tidak dapat meningkatkan minat siswa untuk mendaftar di sekolah tersebut. Di satu sisi, strategi dengan biaya sekolah murah atau gratis, masih menjadi pertimbangan calon siswa. Sebagian dari mereka memiliki tempat tinggal yang jauh dari sekolah, sehingga ada biaya transportasi atau kos yang harus dibayar. Sementara tidak semua sekolah dapat bekerja sama dengan yayasan untuk menampung mereka. Di sisi yang lain, citra sekolah murah atau gratis sama dengan sekolah yang tidak terurus atau tidak bersungguh-sungguh dalam pengelolaannya (Mendikbud dalam Maranda, 2018).

Di balik strategi-strategi ini terungkap peran penting sekolah swasta pilihan II dalam pendidikan di Indonesia. Sekolah swasta pilihan II dapat disebut sebagai ujung tombak pendidikan anak Indonesia yang tidak sempat tersentuh sekolah-sekolah negeri apalagi sekolah favorit. Dapat dikatakan sekolah-sekolah swasta telah menjalankan amanat Pasal 54 ayat 1 UU No 20 2003 (UU Sistem Pendidikan Nasional, tentang peran serta masyarakat

dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, Lembaga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan)

Kesulitan sekolah swasta pilihan II untuk mendapatkan siswa juga berhubungan dengan kebijakan pilihan sekolah yang membebaskan siswa memilih sekolah. Kebebasan siswa memilih sekolah menyebabkan siswa terkonsentrasi pada sekolah-sekolah tertentu. Namun, tidak semua calon siswa dapat diterima karena terdapat persyaratan administrasi, finansial, dan akademis yang menjadi alasan tidak dapat diterima dalam seleksi tersebut. Pada akhirnya, mereka hanya mempunyai pilihan untuk masuk di sekolah pilihan II.

Untuk itu, dalam bagian ini disajikan beberapa keterangan yang diperoleh dari siswa dan orang tua perihal bagaimana akhirnya mereka memutuskan bersekolah di SMA pilihan II.

NOV, salah seorang siswa menyebutkan bahwa ia memutuskan bersekolah di SMA tersebut karena ketiadaan biaya. Ia menjawab singkat:

"... Ya, karena mau di sekolah lain nggak ada biaya.... Kalau dulunya sih pengennya sekolah ke SMK, ke SMK 3 Purwokerto.... Tapi pas mau daftar biayanya ga ada..." (NOV – siswa)

END, ibunda NOV mengatakan bahwa biaya murah sangat membantu menyekolahkan anaknya.

"... o ya, saya kan orang tidak mampu. Saya juga mempunyai tujuan, yang penting NOV tamat SMA. Dulu kan uang masuknya murah. Seratus ribu (per bulan -pen) ya saya malah belum bayar. Ha..ha..ha.." (END – orang tua)

Mengurungkan niat bersekolah di SMA negeri juga dialami TOT. Ia mengurungkan keinginannya karena nilai hasil UN tidak mencukupi untuk masuk ke sekolah negeri.

"...kalau di SMA 5 sama SMA 4 itu kan nggak keterima. Itu soalnya pertama kan daftar di SMA 5, sebelumnya kan kalau pilihan pertamanya SMA 4 kan bisa keterima. Terus kalau di SMK 1 kan udah diterima, kan udah daftar terus diterima tapi nggak diambil terus masuk ke SMA ini disuruh papa..." (TOT – siswa)

RUS, orang tua TOT juga memberikan keterangannya:

"...tadinya mau masuk ke SMA Bruderan, waktu negerinya nggak keterima, terus nggak jadi. Akhirnya ke SMA ini Oh iya, ya tadinya waktu di Bruderan terus papanya kan bilang 'udah di situ aja, nanti pelajarannya kan misalnya pelajaran agama biar papa tahu kalo ditanya gitu'...." (RUS – ortu)

Selama wawancara, RUS enggan menjelaskan secara detail mengapa ia memilih SMA swasta ketika anaknya gagal diterima di SMA negeri. SMA Bruderan dan SMA Kristen merupakan dua SMA swasta yang berbasis agama.

VIO menceritakan pengalamannya ketika memilih sekolah. Berikut penuturannya:

"... sebenarnya niatnya saya nggak pengen sekolah di sini. Cita-citanya sebenarnya sih mau masuk di Boromeus Wonosobo, tapi karena jauh, jadi saya masuk ke SMA ini saja, sama-sama juga sih menurut saya, semua sekolah swasta yah kualitasnya sih hampir sama" (VIO – siswa)

Selain faktor biaya, siswa memilih sekolah swasta pilihan II juga didasari faktor lokasi sekolah atau jarak sekolah dari tempat tinggal siswa. Martono (2016) juga menyebutkan bahwa beberapa kelompok masyarakat memiliki pertimbangan pragmatis ketika memilih sekolah. Pertimbangan tersebut salah satunya adalah jarak sekolah dengan tempat tinggal. Jarak menjadi pertimbangan karena komponen ini akan berpengaruh pada biaya yang harus dikeluarkan orangtua.

Strategi bertahan sekolah tidak cukup dilakukan dengan memfokuskan pada pencarian siswa. Strategi juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan sekolah. Strategi ini ditempuh mengingat input siswa yang diterima sekolah. Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan prestise sekolah. Diharapkan dengan meningkatnya prestise sekolah akan dapat menarik siswa untuk mendaftar di sekolah tersebut.

Paling tidak ada tiga strategi dalam peningkatan kualitas lulusan. Pertama, strategi terkait metode pembelajaran di kelas. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan guru dan kepala sekolah mengenai upaya yang mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas lulusannya di tengah situasi yang cukup sulit di era kompetisi ini.

"...untuk mengatasi kan ada banyak metode, tidak selalu di kelas, itu mungkin keluar. Guru-guru IPA biasanya seneng misalnya di luar, menerangkan. Jadi mungkin dengan kekurangan sarpras, mereka bisa memanfaatkan dirinya Kami juga menambah jam, semacam bimbel pada pagi hari. ..." (TY – kepala sekolah)

TY menuturkan bahwa meningkatkan kualitas *output* dari kualitas *input* yang rendah bukanlah pekerjaan mudah. Untuk itu, guru berupaya menggunakan metode pembelajaran yang variatif, bukan metode di dalam kelas (*indoor*) semata, melainkan juga menggunakan metode belajar di luar ruang kelas (*outdoor*).

Kedua, strategi menambah jam pelajaran di sekolah. Langkah ini dilakukan untuk membangun motivasi belajar siswa dan mengatasi keterbatasan sarana belajar.

Ketiga, strategi peningkatan kompetensi siswa. Sekolah membekali siswa dengan pelajaran tambahan seperti komputer (TIK), kewirausahaan, dan menjahit. Strategi ini ditempuh untuk mempersiapkan siswa menghadapi pasar kerja. Berikut pengakuan para guru terkait strategi ini:

"... waktu di kelas, saya coba membangun motivasi pada anak, di sini salah satunya membekali kompetensi komputer. Diarahkan untuk memunyai ijazah kompetensi. Jadi, itu mungkin satu terobosan untuk menjawab kebutuhan mereka...." (TOR – guru)

"... kalau secara akademik nggak bisa ya kita fokuskan ke keterampilan. Jadi kalau misal akademik nggak bisa ya minimal selesai dari sini kamu bisa berdikari, intine mereka bisa apa, yang seneng masak juga ada. Paling seperti itu..." (SRI – guru)

"... kalo kaitannya dengan skill siswa, kita lewat TIK. Terus dulu kita juga memasukan mapel kewirausahaan, menjahit. Kalo semester ini diganti pengembangan diri, tiap sabtu dua jam pelajaran. Pengembangan diri lebih ke bagaimana agar siswa bisa menghadapi masalah...." (DAN – guru)

Meningkatkan kualitas *input* yang rendah menjadi *output* tinggi adalah tidak mudah, apalagi jika usaha tersebut harus dilakukan dengan sumber daya terbatas. *Input* rendah berdampak pada motivasi belajar siswa.

Sebagian guru meyakini bahwa meskipun siswanya memiliki kualitas akademik rendah, namun mereka memiliki kemampuan nonakademik yang tinggi. Kemampuan nonakademik inilah yang dikembangkan beberapa sekolah.

Kompetisi, Ketimpangan, dan Reproduksi Sosial

Ketika ada kompetisi, maka akan muncul ketimpangan sosial karena setiap individu maupun kelompok masyarakat (dalam konteks studi ini adalah sekolah) memiliki kemampuan atau "modal" berbeda untuk mengakses sumber daya terbatas. "Sumber daya" utama sekolah (swasta) adalah "ketersediaan siswa yang cukup" serta "kelengkapan fasilitas pembelajaran yang lengkap dan memadai". Siswa adalah sumber ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar bagi keberlangsungan sekolah-sekolah swasta.

Kompetisi bukan hanya terjadi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, namun juga terjadi antarsekolah negeri dan antarsekolah swasta. Secara historis, pemerintah "pernah" mendiskriminasi sekolah swasta di era Orde Baru melalui kebijakan akreditasi (Martono, 2016). Pada masa itu, sekolah swasta wajib melakukan akreditasi untuk mendapatkan status "terdaftar", "diakui", dan "disamakan". Status "disamakan" adalah status tertinggi bagi sekolah swasta pada masa itu. Namun tidak ada kejelasan mengenai makna "disamakan" tersebut, apakah status tersebut bermakna "sekolah swasta status dan kualitasnya disamakan dengan sekolah negeri" atau ada pemaknaan lainnya. Jika sekolah swasta harus mendapatkan status "disamakan dengan sekolah negeri" (sebagai status tertinggi), berarti bahwa pemerintah telah menjamin kualitas sekolah negeri, sehingga sekolah negeri pada era tersebut tidak melakukan akreditasi.

Ketika sekolah negeri mendapatkan jaminan kualitas dari pemerintah, masyarakat akan memosisikan dan menganggap bahwa "semua sekolah negeri adalah berkualitas baik", meskipun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Masyarakat pada akhirnya selalu menomorsatukan sekolah negeri.

Dalam perkembangannya, perbedaan minat siswa memilih sekolah negeri atau swasta tidak semata-mata disebabkan faktor perbedaan biaya di antara keduanya. Sekolah negeri cenderung lebih murah daripada sekolah swasta. Meskipun ada sekolah swasta yang mencoba memberikan biaya murah (bahkan gratis), akan tetapi sekolah itu pun tetap tidak diminati banyak siswa. Di sisi lain, ada sebagian sekolah swasta yang lebih mahal justru diminati banyak siswa.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah pilihan II lebih banyak membidik siswa dari kelas bawah. Meskipun sekolah telah menawarkan pembebasan biaya, para siswa dan orang tua tetap tidak berminat masuk ke

sekolah tersebut. Pilihan orang tua yang cenderung memilih sekolah negeri disebabkan mereka menganggap sekolah negeri adalah lebih berkualitas. Kalaupun mereka memilih sekolah swasta, mereka juga akan memilih sekolah swasta yang dianggap berkualitas (Abbott-Chapman, Johnston, & Jetson, 2017; Kosunen & Carrasco, 2016; Poikolainen, 2012). Studi yang dilakukan Altenhofen, Berends, & White (2016) juga menyatakan bahwa salah satu pertimbangan utama orang tua ketika memilih sekolah adalah kualitas sekolah.

Hasil kajian Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2012 (OECD, 2012) mengenai hasil PISA menunjukkan beberapa informasi bahwa siswa yang bersekolah di sekolah swasta cenderung berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih diuntungkan (kelas atas). Di sebagian besar negara dan ekonomi yang mengikuti PISA, rata-rata latar belakang sosial ekonomi siswa sekolah swasta lebih diuntungkan daripada mereka yang bersekolah di sekolah publik (negeri). Akan tetapi, temuan ini tidak berlaku di negara-negara seperti: Luxembourg, Belanda, Korea, Israel, Finlandia, Republik Slovakia, Estonia, Indonesia, Taipei China, Hong Kong-China dan Shanghai China. Di negara-negara tersebut, rata-rata latar belakang sosial ekonomi siswa sekolah swasta justru tidak lebih baik daripada siswa sekolah negeri. Ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah negeri ternyata didominasi siswa kelas menengah ke atas, dan mereka gagal mengakomodasi kebutuhan kelas bawah.

Data OECD ini menguatkan argumentasi mengenai tingkat prestasi siswa sekolah swasta. Kualitas *input* siswa sekolah swasta turut berkontribusi pada rendahnya prestasi siswa. Keterbelakangan prestasi belajar siswa sekolah swasta lebih banyak disebabkan kualitas *input* sekolah swasta yang relatif lebih rendah daripada *input* siswa sekolah negeri.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Mullainathan & Shafir (2013), kompetisi sekolah

menyebabkan tidak semua individu memiliki akses yang sama pada sekolah berkualitas, dan hasil belajar mereka pun berbeda. Studi yang dilakukan Ajayi (2011), Hoxby & Avery (2012), dan Dizon-Ross (2013) menyatakan bahwa kemiskinan memberikan implikasi pada kemampuan orang tua mengakses informasi seputar sekolah, terutama informasi mengenai hasil belajar anaknya. Orang tua siswa miskin kurang memiliki informasi tentang prestasi anak-anak mereka daripada orang tua kaya. Orang tua siswa kaya memiliki akses lebih banyak tentang sekolah dan mungkin tertarik untuk belajar lebih banyak mengenai sekolah mereka. Hasilnya, mereka pun dapat turut mengontrol kinerja anaknya di sekolah.

Secara sosiologis, keberadaan sekolah pilihan II adalah bersifat fungsional untuk menampung siswa-siswa yang "gagal" masuk ke sekolah pilihan pertama karena berbagai alasan. Siswa dari kelas bawah menjadi sasaran utama sekolah pilihan II karena mereka tidak mampu membayar biaya sekolah yang mahal.

Selain masalah ekonomi siswa, sekolah pilihan II juga menghadapi masalah sosial lain, yaitu: masalah kesejahteraan guru dan motivasi belajar siswa yang relatif rendah. Sebagian besar guru SMA swasta pilihan II yang menjadi lokasi penelitian ini mendapatkan penghasilan di bawah standar UMR (Upah Minimum Regional). Jumlah penghasilan ini adalah untuk guru yang belum mendapatkan honor sertifikasi. Padahal di sisi lain, penghasilan adalah salah satu faktor krusial yang dapat memengaruhi kinerja.

Penghasilan tidak hanya berdampak pada kinerja, akan tetapi juga berdampak pada hal lain, yaitu kemampuan guru mengembangkan atau meningkatkan kompetensinya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi guru, sebagian besar guru hanya mengandalkan pertemuan rutin MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) di tingkat kabupaten. Mereka jarang mengikuti berbagai pelatihan atau seminar yang

diselenggarakan di tingkat provinsi bahkan nasional. Sementara, sekolah mereka pun tidak memiliki dana memadai untuk mengikutsertakan guru-gurunya dalam kegiatan tersebut.

Keringanan biaya sekolah ternyata bukanlah solusi yang mampu menyelesaikan semua masalah. Masalah motivasi belajar siswa hampir selalu “menghantui” guru-guru di sekolah pilihan II. Banyak siswa tidak memiliki semangat belajar, mereka enggan mengikuti proses pembelajaran, akibatnya mereka sering membolos (dan sebagian lain memilih tidak masuk sekolah dalam beberapa hari bahkan beberapa minggu).

Guru mengalami kesulitan mendongkrak capaian. Mereka “terpaksa” menerima siswa yang tidak memiliki kualifikasi akademik baik, namun guru dituntut meningkatkan prestasi siswa yang sama dengan sekolah-sekolah dengan *input* yang baik. Ini merupakan sebuah bentuk ketidakadilan yang dirasakan beberapa guru.

Dikotomi ini menyebabkan siswa lebih banyak terserap ke sekolah pilihan pertama, terutama sekolah negeri. Hal ini bukanlah sebuah “anomali” manakala banyak siswa lebih memilih sekolah pilihan pertama. Bagaimanapun juga siswa memiliki kebebasan memilih sekolah terbaik baginya. Akan tetapi, masalah akan muncul ketika siswa pintar dan kaya terkonsentrasi di beberapa sekolah saja, dan sekolah lain justru didominasi siswa dengan kemampuan akademik rendah dan sebagian besar siswa berasal dari kelas bawah. Kita kemudian dapat mengatakan bahwa sekolah-sekolah swasta pilihan II lebih banyak memiliki visi “sosial”, membantu siswa dari kelas bawah. Sementara, sekolah-sekolah pilihan pertama (terutama sekolah swasta) justru lebih banyak berorientasi bisnis (Darmaningtyas, 2015).

Peran sosial sekolah swasta pilihan II seharusnya diakomodasi dan menjadi fokus kebijakan pemerintah. Hal ini disebabkan jumlah sekolah negeri di beberapa wilayah tidak mampu menampung semua siswa usia sekolah. Jika

peran sekolah ini diabaikan, akan ada jutaan siswa tidak mampu yang tinggal jauh dari sekolah negeri yang tidak akan menikmati layanan pendidikan berkualitas.

Sekolah-sekolah swasta berbasis agama juga memiliki peran penting sebagai sarana mentransfer dan mengembangkan nilai-nilai agama kepada siswa di sekolah. Terlepas dari dampak segregasi yang ditimbulkan akibat keberadaan sekolah-sekolah berbasis agama yang bersifat eksklusif, sekolah swasta berbasis agama menjadi angin segar bagi para orang tua yang mendambakan sekolah yang mengutamakan penanaman nilai agama untuk putra-putri mereka. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa faktor kesamaan agama menjadi modal bagi sebagian sekolah berbasis agama untuk mendapatkan siswa.

Sejumlah penelitian mengenai hubungan sekolah dan kelas (Knopp, 2012) menyatakan bahwa sekolah berkaitan erat dengan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat. Marxisme berpendapat bahwa kapitalisme telah menyebabkan pendidikan di sekolah tidak berpihak pada kelompok kelas bawah. Praktik pendidikan di seluruh negara telah menyebabkan reproduksi sosial dan ketidaksetaraan sosial. Proses ini memengaruhi kesempatan individu untuk mengakses pendidikan. Anak-anak kelas bawah tidak dapat mengakses lembaga pendidikan berkualitas. Cita-cita kelompok liberalis yang menjanjikan peningkatan kualitas siswa dan sekolah melalui mekanisme kompetisi bebas masih menjadi perdebatan sampai saat ini.

Segregasi sosial akibat kompetisi antar-sekolah telah mereproduksi ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat. Sekolah yang seharusnya mampu mewujudkan perubahan sosial dan mempercepat mobilitas sosial, atau menjanjikan kemajuan bagi siswanya, ternyata gagal mewujudkan cita-citanya. Sebagian pihak berpandangan bahwa sekolah swasta merupakan bagian masalah ketimpangan sosial.

Namun, di sisi lain sekolah swasta dapat dipandang sebagai bagian dari solusi (Winkley, 2017).

Dalam kultur pendidikan yang bersifat kapitalistik, kepentingan bisnis menjadi orientasi utama dalam layanan pendidikan. Sekolah menjadi lembaga bisnis yang melayani kepentingan kelompok dominan. Sekolah yang berusaha menolak "kodrat" ini dengan mengedepankan tujuan sosial dan konsisten melayani kelompok bawah, akan sulit bertahan.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa kompetisi antarsekolah di Indonesia belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas banyak sekolah swasta sebagaimana dicita-citakan pendukung liberalisme. Hal ini disebabkan kompetisi justru menyebabkan sekolah-sekolah swasta pilihan II semakin terpuruk karena kekurangan modal, sedangkan sekolah-sekolah pilihan pertama semakin eksis. Kompetisi juga menciptakan pendidikan eksklusif, ketika sekolah-sekolah elit hanya dapat diakses golongan tertentu sehingga tidak ada sistem meritokrasi. Meritokrasi hanyalah sebuah jargon, pada kenyataannya meritokrasi hanya dimiliki kelompok tertentu yang memiliki modal, termasuk dalam hal ini adalah kemampuan memilih sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Masalah utama yang dihadapi sekolah pilihan II adalah rendahnya minat dan kualitas siswa yang mendaftar di sekolah tersebut.

Strategi yang ditempuh sekolah berkaitan dengan rendahnya minat siswa yang mendaftar dan rendahnya kualitas siswa di sekolah swasta pilihan II adalah untuk dapat bertahan.

Ada empat strategi yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah siswa. Pertama, strategi jemput bola. Strategi ini dilakukan dengan dua model, yakni sekolah melakukan jemput bola ke

SMP-SMP yang menjadi sasaran potensial dan para guru *door-to-door* ke rumah calon siswa. Kedua, strategi memanfaatkan jaringan sekolah yang masih berada dalam satu organisasi atau yayasan yang sama. Organisasi atau yayasan yang menjadi mitra kerja sama sekolah adalah organisasi atau yayasan yang bergulat di bidang keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. NU sendiri merupakan organisasi terbesar dan menjadi afiliasi sebagian besar pondok pesantren yang mendukung sekolah swasta dalam strategi bertahan. Ketiga, promosi ke sekolah-sekolah yang menjadi target potensial di sekitarnya bahkan sampai ke sekolah yang jaraknya relatif jauh ke luar kota. Keempat, sekolah menawarkan biaya sekolah murah, bahkan menawarkan sekolah gratis bagi siswa tidak mampu.

Dalam upaya peningkatan kualitas lulusan ada tiga strategi yang dilakukan. Pertama, variasi model pembelajaran di kelas. Kedua, penambahan jam pelajaran guna membangun motivasi siswa. Ketiga, meningkatkan kompetensi siswa melalui penambahan pelajaran seperti TIK, kewirausahaan, dan menjahit.

Saran

Pemerintah harus merevisi beberapa kebijakan yang berpotensi mendiskriminasi sekolah-sekolah swasta. Sekolah swasta seharusnya diberi hak yang sama dengan sekolah negeri karena pada dasarnya mereka memiliki peran penting yang tidak dapat dilakukan sekolah-sekolah negeri, misalnya, menampung siswa yang tidak mampu yang tidak tertampung atau tidak diterima di sekolah-sekolah negeri pilihan pertama. Peran penting mereka harus mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Minimal pemerintah memberikan bantuan operasional bagi sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari kelas bawah.

PUSTAKA ACUAN

- Abbott-Chapman, J., Johnston, R. & Jetson, T. (2017). Rural parents' school choices: affective, instrumental and structural influences. *Australian and International Journal of Rural Education*, 27 (3),126-141.
- Ajayi, K. F. (2011). School choice and educational mobility: Lessons from secondary school applications in Ghana. *Working Paper*. http://people.bu.edu/kajayi/Ajayi_EducationalMobility.pdf, diakses 30 Mei 2018.
- Altenhofen, S., Berends, M. & White, T.G. (2016). School choice decision making among suburban, high-income parents. *AERA Open*, 2(1),1-14. DOI: 10.1177/2332858415624098.
- Antara. (2015). Sejumlah sekolah swasta di Siantar terancam tutup. *Berita Satu*. <https://www.beritasatu.com/nasional/257253-sejumlah-sekolah-swasta-di-siantar-terancam-tutup>, diakses 23 Oktober 2017.
- Arumsari, N. (2017). Strategi branding SD Negeri dalam menghadapi persaingan dengan SD Islam Terpadu. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Aurini, J. & Quirke, L. (2011). Strategic action in the private education sector? *Canadian Journal of Sociology*. 36(2), 173-197.
- Benson, M., Bridge, G., & Wilson, D. (2015). School choice in London and Paris: A comparison of middle-class strategies. *Social Policy & Administration*, 49(1), 24-43.
- Buddin, R. (2012) The Impact of *charter schools* on public and private school enrollments. *Policy Analysis*. No. 707. <http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/PA707.pdf>, diakses 3 Juni 2015.
- Darmaningtyas. (2015). *Pendidikan yang memiskinkan*. Malang: Intrans Publishing.
- Davis, T.M. (2013). Charter school competition, organization, and achievement in traditional public schools. *Education Policy Analysis Archives*, 21(88),1-33. <http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1279>, diakses 8 Juni 2015.
- Dizon-Ross, R. (2013). Parents perceptions and their childrens education: Experimental evidence from Malawi. *Working Paper*, <https://www.semanticscholar.org/paper/Parents'-perceptions-and-children'-s-education-%3A-Dizon-Ross/9f80ba1b30bc7d0b11dcfc7b0db4a287e6e67423#citing-papers>, diakses 30 Oktober 2018.
- Habit. (2016). Jelang tahun ajaran baru - banyak sekolah swasta di Karangasem terancam gulung tikar. *Bali Tribune*. <https://balitribune.co.id/content/jelang-tahun-ajaran-baru-banyak-sekolah-swasta-di-karangasem-terancam-gulung-tikar> diakses 23 Oktober 2017.
- Hoxby, C. & Avery, C. (2013). The missing "one-offs": the hidden supply of high-achieving, low-income students. *Brookings Papers On Economic Activity*. 2013 (1),1-65. <https://www.nber.org/papers/w18586>, diakses 30 Mei 2018.
- Jubelina & Supramono (2013) Strategi bersaing sekolah Kristen Lentera Ambarawa. *Satya Widya*, 29(2), 73-82.
- Khasanah, A. (2015). Pemasaran jasa pendidikan sebagai strategi peningkatan mutu di SD Alam Baturraden. *Jurnal eL-Tarbawi*. 8(2),161-176. DOI: <http://dx.doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss2.art4>.

- Knopp, S. (2012). School, Marxis, and Liberation, in Bale, Jeff, & Knopp, Sarah. (eds.) *Education and Capitalism*. Chicago: Haymarket Books.
- Kosunen, S. & Carrasco, A. (2016). Parental preferences in school choice: comparing reputational hierarchies of schools in Chile and Finland. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 46 (20), 172–193. <https://doi.org/10.1080/03057925.2013.861700>.
- Kusumo, H. (2018). Pemanfaatan brosur sebagai media promosi untuk meningkatkan jumlah peserta didik pada duta *Islamic School* (DIS) Semarang. *Jurnal Nusamba*, 3(1), 88-94. DOI: <https://doi.org/10.29407/nusamba.v3i1.11916>.
- Maranda, S. (2018). Mendikbud: jangan percaya jika ada yang janjikan sekolah gratis. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1072728/mendikbud-jangan-percaya-jika-ada-yang-janjikan-sekolah-gratis/full&view=ok>.
- Martono, N. (2016). La politique d'assurance de la qualité au lycée en indonésie: Le système d'accréditation, la perception d'acteur, et la compétition. *These de doctorat*. Lyon: Universite de Lyon 2.
- Martono, N. (2017). *Sekolah publik vs sekolah privat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Martono, N. (2018). *Kematian sekolah swasta*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muttaqin. (2017). Pemikiran dan manajemen pendidikan NU dan Muhammadiyah. *Nur El-Islam*, 4(1), 1-39.
- Mullainathan, S., A. Mani, E. Shafir, & J. Zhao. (2013) Poverty impedes cognitive function. *Science*, 341, 976-980.
- OECD. (2012). *Public and private schools: how management and funding relate to their socio-economic profile*. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264175006-en>.
- Poikolainen, J. (2012) A case study of parents' school choice strategies in a finnish urban context. *European Educational Research Journal*, 11(1), 127-143. DOI: 10.2304/eerj.2012.11.1.127.
- Safutra, I. (2017). Tempat lain kelimpahan peminat, sekolah ini hanya sebagian satu siswa. *Jawa Pos*. <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/11/07/2017/tempat-lain-kelimpahan-peminat-sekolah-ini-hanya-kebagian-satu-siswa/>, diakses 23 Oktober 2017.
- Santhosa, I. G. J. (2015). Tak sebagian siswa, SMA PGRI di Bali ini pilih tutup. *Tribun Bali*, 23 Oktober 2017. <https://bali.tribunnews.com/2015/01/26/tak-kebagian-siswa-sma-pgri-di-bali-ini-pilih-tutup>, diakses 23 Oktober 2017.
- Suprayogo. (2015). Menjadikan NU sebagai penggerak ekonomi umat. *Gema Media Informasi dan Kebijakan Kampus*, 4 Agustus 2015, Malang: UIN Malang. <https://www.uin-malang.ac.id/r/150801/menjadikan-nu-sebagai-penggerak-ekonomi-umat.html>, diakses 23 Oktober 2017.
- Winkley, L. (2017). Private schools can help social mobility. *The Guardian*. April, 17, 2017. <https://www.theguardian.com/education/2017/apr/24/private-schools-can-help-social-mobility> , diakses 19 Oktober 2017.
- Yulianto. (2017). Pertumbuhan pesantren di indonesia dinilai menakjubkan. *Republika*, 30 November 2017. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/30/p088lk396-pertumbuhan-pesantren-di-indonesia-dinilai-menakjubkan>.